

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN
KAMPUNG WISATA DI KELURAHAN KEPRABON
KECAMATAN BANJARSARI
KOTA SURAKARTA**

Oleh :

**Luthfi Khamid¹⁾,
Dr. Suwardi, M.Si²⁾,
Dr. Drs. Aris Tri Haryanto, M.Si³⁾**

ABSTRAK

Hasil penelitian Collaborative Governance dalam pengembangan Kampung Wisata Kelurahan Keprabon dilakukan dengan beberapa hal yaitu : 1) Dialog tatap muka sebagai alat komunikasi dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon sangatlah penting untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan masalah bersama, dan merancang strategi yang efektif. Masyarakat lokal yang dilibatkan dalam dialog ini akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengembangan wisata, yang pada gilirannya akan memperkuat keberlanjutan kampung wisata tersebut. 2) Membangun kepercayaan dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon merupakan proses yang memerlukan komunikasi terbuka, keterlibatan aktif masyarakat, konsistensi dalam tindakan, serta komitmen terhadap keberlanjutan proyek. Kepercayaan yang dibangun dengan baik akan memungkinkan semua pihak bekerja sama dengan lebih efektif dan mewujudkan pengembangan kampung wisata yang inklusif dan berkelanjutan. Kepercayaan ini harus dipupuk secara terus-menerus melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta penghargaan terhadap kearifan lokal yang ada. 3) Komitmen untuk memproses dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon sangat penting untuk keberhasilan proyek ini. Semua pihak yang terlibat harus memiliki kesadaran yang sama tentang pentingnya menjalankan proses dengan penuh tanggung jawab, dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini akan memastikan bahwa pengembangan kampung wisata dapat berlangsung dengan terkoordinasi, mengatasi tantangan yang muncul, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Kata Kunci : Collaborative Governance Kampung Wisata

ABSTRACT

The results of the Collaborative Governance study in the development of the Keprabon Village Tourism Village were carried out with several things, namely: 1) Face-to-face dialogue as a communication tool in collaboration in

developing tourist villages in Keprabon Village is very important for building trust, solving problems together, and designing effective strategies. Local communities involved in this dialogue will feel ownership and responsibility for tourism development, which in turn will strengthen the sustainability of the tourism village. 2) Building trust in collaborative tourism village development in Keprabon Village is a process that requires open communication, active community involvement, consistency in action, and commitment to project sustainability. Well-built trust will enable all parties to work together more effectively and realize inclusive and sustainable tourism village development. This trust must be continuously fostered through transparent and accountable management, as well as respect for existing local wisdom. 3) Commitment to process in collaborative tourism village development in Keprabon Village is very important for the success of this project. All parties involved must have the same awareness of the importance of carrying out the process with full responsibility, from planning to evaluation. This will ensure that tourism village development can take place in a coordinated manner, overcome emerging challenges, and provide sustainable benefits for the community, government, and private sector.

Keywords: Collaborative Governance Tourism Village

A. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional, sebagai sumber devisa dan mendukung pembangunan negara. Pariwisata, yang merupakan perjalanan terencana untuk tujuan tamasya, kini telah menjadi fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, dan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, pariwisata berdampak positif pada perekonomian, menciptakan peluang usaha, meningkatkan penerimaan pajak, dan menarik investasi di berbagai sektor.

Pengembangan pariwisata memerlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan, yang dikenal dengan istilah collaborative governance. Pendekatan ini melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan bersama.

Kota Surakarta memiliki kampung tematik, yang mencakup kampung seperti Kampung Batik Laweyan dan Kampung Permata Jayengan, yang meningkatkan ekonomi lokal. Pada 2023, Pemerintah Kota Surakarta menetapkan 6 kelurahan sebagai kampung wisata, termasuk Keprabon. Keprabon, yang terletak di Kecamatan Banjarsari, memiliki sejarah panjang, dan kini dikenal karena pembangunan rumah deret yang mempercantik wajah kelurahan, sekaligus meningkatkan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sektor pariwisata memiliki kontribusi penting dalam perekonomian negara, termasuk melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan peluang ekonomi. Pengembangan pariwisata di daerah seperti Kelurahan Keprabon di Kota Surakarta, yang telah ditetapkan sebagai kampung wisata, berpotensi memberikan dampak positif dalam

bidang ekonomi dan budaya. Namun, untuk mengoptimalkan pengembangan ini, dibutuhkan kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta), yang dikenal dengan istilah Collaborative Governance.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan Collaborative Governance di Keprabon antara lain kurangnya koordinasi antar stakeholder, ketidakpahaman tentang konsep tata kelola kolaboratif, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, ketidakstabilan sosial dan politik serta potensi dampak negatif terhadap budaya dan lingkungan juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pengembangan

Kampung Wisata Keprabon memerlukan perencanaan yang matang, dukungan sumber daya yang memadai, dan kerjasama yang lebih baik antar semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan rumusan masalah

tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk : mendeskripsikan analisis perspektif *Collaborative Governance* dalam pengembangan Kampung Wisata Kelurahan Keprabon

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali masalah atau fenomena secara mendalam, dengan fokus pada pemahaman makna dari pengamatan dan wawancara. Metode ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi atau peristiwa yang ada, melibatkan subjektivitas peneliti (Pasolong, 2012; Bungin, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Kelurahan Keprabon mengelola dan mengembangkan Kampung Wisata, dengan menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Fokus penelitian kualitatif bersifat holistik, mencakup keseluruhan situasi sosial yang saling berinteraksi, termasuk tempat, pelaku, dan aktivitas (Sugiyono, 2012). Menentukan fokus penelitian penting untuk membangun

batasan studi, menghindari kebingungan, dan memastikan relevansi data yang dikumpulkan (Ahmadi, 2016). Fokus penelitian ini adalah pengelolaan Kampung Wisata Kelurahan Keprabon dari perspektif Collaborative Governance, yang meliputi identifikasi stakeholder, model Collaborative Governance Ansell dan Gash, serta faktor pendukung dan penghambat pengelolaan, seperti peraturan, kelembagaan, operasional, pembiayaan, dan peran serta masyarakat.

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang dipilih oleh peneliti karena kemudahan akses data karena peneliti juga bekerja di kelurahan tersebut. Situs penelitian terletak di Kampung Wisata Kelurahan Keprabon, RW I RT 1, yang dipilih karena merupakan sentra Kampung Wisata dan dekat dengan Kantor Kelurahan. Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dengan informan terkait, seperti Lurah Keprabon, Sekretaris Kelurahan, dan berbagai instansi terkait, serta sumber sekunder yang diperoleh melalui studi

dokumen, arsip, dan literatur terkait.

Sumber data penelitian ini mencakup informasi tentang geografi, demografi, sosial ekonomi, dan budaya daerah penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Dialog Tatap Muka (*face to face dialog*) dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon

Pada bagian ini, pembahasan akan difokuskan pada analisis temuan penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sesuai teori *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), terdapat 5 indikator utama yaitu dimulai dari Dialog tatap muka (*Face to face dialog*), Membangun kepercayaan (*Trust building*), Komitmen dalam proses kolaborasi (*Commitment to process*), Pemahaman bersama (*Shared understanding*), dan Hasil

sementara (*intermediate outcome*).

Dialog tatap muka merupakan sebuah tahap yang harus dilakukan dalam sebuah kolaborasi, dialog tatap muka disinilah yang akan menentukan terbentuknya kepercayaan dan komitmen yang akan mendasari didalam kolaborasi yang akan dilakukan sehingga dapat tercapai kesepakatan dan tujuan bersama antar semua pihak yang terlibat sesuai dengan dialog tatap muka yang telah dilakukan.

Dialog tatap muka yang dilakukan dalam proses *collaborative governance* dalam pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon ini dimulai dengan tatap muka yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah biasanya mengadakan pertemuan tatap muka dengan masyarakat untuk menggali potensi wisata yang ada dan mendengar kebutuhan serta harapan mereka terkait pembangunan kampung wisata. Ini juga bertujuan untuk membangun keterlibatan masyarakat

sejak awal.

Hasil penelitian terkait Dialog Tatap Muka (*face to face dialog*) dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon mengarah pada pentingnya interaksi langsung antara pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan destinasi wisata lokal. Secara umum, penelitian ini akan menunjukkan bagaimana dialog tatap muka dapat memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa poin yang mungkin dibahas dalam penelitian tersebut:

a. Pentingnya Dialog Tatap Muka dalam Kolaborasi

Dialog tatap muka memungkinkan komunikasi yang lebih jelas dan tidak terdistorsi oleh perantara teknologi. Pertemuan langsung dapat mempercepat pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Membangun kepercayaan dalam konteks pengembangan kampung wisata, saling percaya antara

pihak-pihak yang terlibat sangat penting. Dialog tatap muka memberi kesempatan untuk membangun hubungan personal, yang lebih mendalam daripada komunikasi jarak jauh.

b. Peran Masyarakat Lokal

Penelitian ini bisa menunjukkan bagaimana masyarakat lokal di Kelurahan Keprabon dapat terlibat langsung dalam dialog dan pengambilan keputusan terkait pengembangan kampung wisata. Keputusan yang melibatkan mereka lebih mungkin diterima karena mereka merasa menjadi bagian dari proses tersebut.

Pemanfaatan sumber daya lokal, dimana kolaborasi antara masyarakat dan pihak lain dapat menghasilkan ide-ide baru mengenai pemanfaatan sumber daya lokal yang unik, seperti budaya, kerajinan, atau kuliner khas daerah.

c. Peran Pemerintah dan Stakeholder

Pentingnya dukungan pemerintah baik di tingkat kelurahan maupun kota, memiliki peran krusial dalam

memfasilitasi dialog ini dengan menyediakan fasilitas atau pendanaan yang dibutuhkan untuk pengembangan kampung wisata. Peran sektor swasta, seperti Investor atau pengusaha lokal bisa terlibat dalam dialog untuk menyusun strategi pemasaran atau pengelolaan fasilitas yang mendukung keberlanjutan pariwisata di kampung tersebut.

d. Proses Pengambilan Keputusan dalam Kolaborasi

Partisipasi dalam perencanaan yang melibatkan banyak pihak (pemerintah, masyarakat, swasta, dll) dapat menghasilkan keputusan yang lebih berkelanjutan. Dialog tatap muka memperkuat partisipasi aktif dalam merancang visi dan misi pengembangan kampung wisata. Kolaborasi antar pihak yang berbeda tentu bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Dialog tatap muka memungkinkan penyelesaian konflik secara langsung dengan cara yang konstruktif.

e. Tantangan dan Solusi dalam Dialog Tatap Muka

Hambatan dalam komunikasi

yaitu terkadang, perbedaan latar belakang, budaya, atau kepentingan bisa menjadi hambatan dalam dialog. Oleh karena itu, penting untuk membangun pemahaman bersama agar kolaborasi berjalan efektif. Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi adalah kesulitan dalam mengorganisir pertemuan tatap muka secara rutin, terutama jika ada keterbatasan sumber daya atau waktu.

Penelitian ini bisa juga menilai bagaimana kolaborasi yang dipicu oleh dialog tatap muka membawa dampak pada peningkatan ekonomi lokal, seperti lapangan pekerjaan baru atau peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Keberhasilan pengembangan kampung wisata tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung, tetapi juga dari seberapa baik kampung tersebut dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Dengan demikian dialog tatap muka sebagai alat komunikasi dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon

sangatlah penting untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan masalah bersama, dan merancang strategi yang efektif. Masyarakat lokal yang dilibatkan dalam dialog ini akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengembangan wisata, yang pada gilirannya akan memperkuat keberlanjutan kampung wisata tersebut.

2. Membangun kepercayaan

(*trust building*) dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon

Membangun kepercayaan merupakan suatu hal yang penting dalam menjalin sebuah kolaborasi agar dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan dan tujuan yang telah ditentukan pada tahap dialog tatap muka berlangsung. Upaya yang dilakukan untuk membangun kepercayaan oleh stakeholder dalam *collaborative governance* dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon yaitu dengan melakukan transparansi dalam

setiap proses kolaborasi yang akan dilakukan, evaluasi dan monitoring rutin juga dilakukan sebagai bentuk upaya dalam membangun kepercayaan antar stakeholder dalam kolaborasi tersebut.

Kepercayaan yang rendah antar stakeholder bisa menjadi salah satu faktor penghambat dalam *collaborative governance*. Begitupun dengan *collaborative governance* dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon.

Kepercayaan (trust) merupakan salah satu aspek kunci yang sangat menentukan keberhasilan kolaborasi antara berbagai pihak dalam pengembangan kampung wisata. Dalam konteks Kelurahan Keprabon, membangun kepercayaan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan kerja sama yang efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah analisis dan pembahasan terkait membangun kepercayaan dalam kolaborasi pengembangan kampung

wisata di Kelurahan Keprabon.

Kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap bentuk kolaborasi. Tanpa kepercayaan, komunikasi menjadi terhambat, dan upaya kolaboratif dapat dengan mudah mengalami kegagalan. Dalam pengembangan kampung wisata, kepercayaan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama secara harmonis, berbagi informasi yang relevan, dan menyelesaikan masalah bersama.

Beberapa alasan mengapa kepercayaan sangat penting dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata antara lain:

- a. Kepercayaan meminimalisir potensi konflik antar pihak yang terlibat karena adanya pengertian bahwa semua pihak memiliki niat baik dan tujuan yang sama.
- b. Dengan adanya kepercayaan, pihak-pihak yang terlibat lebih terbuka dalam berbagi informasi yang mungkin penting bagi pengembangan wisata. Ini juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif.
- c. Kepercayaan memungkinkan

pihak-pihak yang terlibat untuk bernegosiasi dengan lebih lancar, mengingat mereka percaya bahwa semua pihak akan saling menghormati kesepakatan yang dicapai.

Dalam konteks pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon, ada beberapa tahapan dalam proses membangun kepercayaan, antara lain:

- a. Kepercayaan pertama-tama dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. Pihak pemerintah, misalnya, perlu menyampaikan secara jelas rencana dan tujuan pengembangan kampung wisata, serta bagaimana dana atau sumber daya lainnya akan dialokasikan. Masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk berbicara tentang kekhawatiran atau harapan mereka.
- b. Penting agar semua pihak tahu bagaimana keputusan akan dibuat, dan informasi apa saja yang akan dibagikan serta bagaimana pengaruhnya terhadap mereka.

Hal ini mengurangi ketidakpastian yang dapat menumbuhkan ketidakpercayaan.

Selanjutnya masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sejak awal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam dialog tatap muka akan memperkuat kepercayaan mereka terhadap pihak-pihak yang terlibat, terutama pemerintah dan pengusaha lokal. Jika mereka merasa suara mereka dihargai dan mereka memiliki peran dalam pengambilan keputusan, kepercayaan terhadap proses dan pihak-pihak tersebut akan meningkat.

Kepercayaan juga tumbuh ketika masyarakat merasa diberdayakan, misalnya dengan diberi pelatihan atau pengetahuan untuk mengelola dan memasarkan produk wisata mereka. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan proyek wisata.

Kepercayaan lebih mudah dibangun jika semua pihak menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan proyek.

Misalnya, pemerintah dan sektor swasta perlu menunjukkan bahwa mereka memiliki rencana jangka panjang untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat, bukan hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek. Misalnya, dalam hal pembagian keuntungan yang dihasilkan dari kampung wisata, semua pihak harus memahami bagaimana hasilnya akan didistribusikan dan bagaimana keberlanjutan proyek akan dijaga. Hal ini akan menghindari kecurigaan dan ketidakpercayaan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, kurangnya kepercayaan terhadap hasil yang akan dicapai dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon menjadi salah satu penghambat proses revitalisasi yang dilakukan.

3. Komitmen untuk memproses (*commitment to process*) dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon

Komitmen di dalam proses

kolaborasi merupakan salah satu kunci keberhasilan yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kolaborasi yang akan dilakukan. Komitmen ini bukanlah suatu hal yang muncul dengan sendirinya, tetapi harus mampu diciptakan dan diterapkan langsung oleh semua stakeholder yang terlibat didalam sebuah kolaborasi. Seharusnya komitmen yang dilakukan bukan hanya pada saat awal melakukan sebuah kolaborasi saja, tetap komitmen itu harus tetap dijaga dan diterapkan sampai ini, juga untuk keberlanjutan kelurahan Keprabon menjadi Kampung Wisata dimasa yang akan datang.

Dalam teori (Ansell & Gash, 2008), komitmen merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mendukung keberhasilan sebuah kolaborasi. Begitupun sebaliknya, kolaborasi tidak akan berjalan dengan optimal apabila komitmen yang dijalankan masih rendah dan minim. Selaras dengan hal tersebut, Komitmen merupakan salah satu faktor

penghambat kurang maksimalnya hasil dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon.

Pada tahap ini, para pemangku kepentingan perlu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang bisa dicapai. Pemahaman ini mencakup adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang jelas, serta pemahaman mengenai nilai-nilai yang akan diperoleh dari kolaborasi (Astuti et al., 2020).

Bentuk upaya yang dilakukan dalam membangun pemahaman bersama *collaborative governance* dalam pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon yaitu dengan memberikan pemahaman kepada semua stakeholder dengan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu ingin menjadikan Kelurahan Keprabon ini menjadi Kampung Wisata. Semua stakeholder harus memahami tujuan yang sama, visi misi yang sama, dan konsep *collaborative governance* dalam pengembangan

kampung wisata di Kelurahan Keprabon ini juga harus berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan di awal.

Dalam konteks pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon, komitmen untuk memproses adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengembangan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan berkelanjutan. Komitmen ini berkaitan dengan bagaimana semua pihak yang terlibat—termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta—terikat untuk menjalankan setiap proses, baik itu perencanaan, implementasi, maupun evaluasi, dengan tekad dan dedikasi yang tinggi.

Komitmen untuk memproses merujuk pada dedikasi dan keseriusan semua pihak dalam menjalankan seluruh rangkaian proses pengembangan kampung wisata. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang memerlukan ketekunan, konsistensi, dan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan.

Komitmen terhadap proses sangat penting dalam pengembangan kampung wisata karena:

- a. Kolaborasi yang didasarkan pada komitmen untuk memproses memungkinkan adanya rencana yang jelas dan terstruktur, serta pemantauan berkala untuk memastikan kemajuan.
- b. Setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk mengikuti proses yang disepakati bersama, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kampung wisata.
- c. Dengan adanya komitmen pada proses, kemungkinan ketidaksesuaian antara tujuan awal dengan implementasi dapat diminimalisir. Proses yang dijalankan dengan konsisten akan lebih memungkinkan pengelolaan yang sukses.

Proses pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon membutuhkan komitmen untuk memproses dalam setiap

tahapan. Beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah:

- a. Tahap pertama adalah perencanaan, yang harus dilakukan secara partisipatif dan inklusif. Semua pihak—termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta—harus berkomitmen untuk menghabiskan waktu yang cukup dalam merumuskan rencana yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dalam proses perencanaan, penting bagi semua pihak untuk menyepakati visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai melalui pengembangan kampung wisata. Ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga pelestarian budaya, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Setelah perencanaan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan, yang memerlukan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat. Komitmen pada proses berarti bahwa setiap pihak harus bertanggung jawab

terhadap tugas yang telah disepakati dalam rencana tersebut. Dalam implementasi, pasti akan ada tantangan dan hambatan. Namun, komitmen pada proses berarti bahwa setiap pihak akan berusaha untuk tetap pada jalur yang telah disepakati, melakukan penyesuaian bila diperlukan, dan menyelesaikan masalah bersama.

Membangun komitmen untuk memproses tidak hanya tentang mengikuti langkah-langkah teknis, tetapi juga melibatkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan jangka panjang. Beberapa aspek kunci dalam membangun komitmen pada proses pengembangan kampung wisata adalah: Pemerintah, baik itu di tingkat kelurahan maupun kecamatan, harus memainkan peran kunci dalam memimpin proses pengembangan kampung wisata. Kepemimpinan yang tegas dan visioner akan memotivasi seluruh pihak untuk bekerja bersama menuju tujuan yang telah disepakati. Pemimpin yang baik akan memastikan bahwa setiap pihak merasa dihargai

dan terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan. Ini dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap proses.

Keberhasilan kolaborasi bergantung pada bagaimana informasi mengalir di antara semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang terbuka

dan efektif akan memperkuat komitmen semua pihak untuk melanjutkan proses sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Ketika masalah atau hambatan muncul, komitmen untuk memproses berarti setiap pihak harus siap untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan mencari solusi secara bersama.

PENUTUP

1. Dialog tatap muka sebagai alat komunikasi dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon sangatlah penting untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan masalah bersama, dan merancang strategi yang efektif. Masyarakat lokal yang dilibatkan dalam

dialog ini akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengembangan wisata, yang pada gilirannya akan memperkuat keberlanjutan kampung wisata tersebut.

2. Membangun kepercayaan dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon merupakan proses yang memerlukan komunikasi terbuka, keterlibatan aktif masyarakat, konsistensi dalam tindakan, serta komitmen terhadap keberlanjutan proyek. Kepercayaan yang dibangun dengan baik akan memungkinkan semua pihak bekerja sama dengan lebih efektif dan mewujudkan pengembangan kampung wisata yang inklusif dan berkelanjutan. Kepercayaan ini harus dipupuk secara terus-menerus melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta penghargaan terhadap kearifan lokal yang ada.

3. Komitmen untuk memproses

dalam kolaborasi pengembangan kampung wisata di Kelurahan Keprabon sangat penting untuk keberhasilan proyek ini. Semua pihak yang terlibat harus memiliki kesadaran yang sama tentang pentingnya menjalankan proses dengan penuh tanggung jawab, dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini akan memastikan bahwa pengembangan kampung wisata dapat berlangsung dengan terkoordinasi, mengatasi tantangan yang muncul, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Erwin. 2022. *Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Adat, pada Komunitas Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang*. Jurnal Universitas Jenderal Soedirman Vol. 6

Arikunto,
Suharsimi.1993.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
Jakarta:Rineka Cipta

Astuti, Sunu, Retno. 2020.

- Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik.* Semarang: Universitas Diponegoro Press
- Fajar, Nur. 2024. *Pengembangan Kapasitas Desa Wisata di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa*. Makasar: Universitas Hasanuddin
- Hartinah, Sri, 2017. *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Herlambang, Ridlo, Afif. 2022. *Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Karangsalam Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Kismartini dan Yusuf, Murtadlho, Irfan. 2023. *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurniawan, M. 2017. "Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Malang melalui Implementasi Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PUBLISIA. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 2 nomor 2
- Marpaung, Happy dan Bahar. 2000. *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Maulia, Indah, Erica dan Setiyono, Budi. *Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata*. Jurnal FISIP Universitas Diponegoro
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications Inc
- Minta Harsana. 2020. *Potensi Makanan Tradisional Sebagai Daya Tarik Wisata Kuliner D.I Yogyakarta. Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana*. Yogyakarta: FT UNY
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Moreta, Adinda dan MS, Harirah, Zulfa. 2023. *Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022*. Journal of Social and Policy Issues. Vol.3. no. 3
- Muhammad, Juang, Abdi. 2021. *Collaborative Governance Pengembangan Desa Wisata Sanankerto dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. FIA UB vol.7 no.2
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Keybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nurdin, Ismail & Hartati, Sri, 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media

- Sahabat Cendekia
Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata
- Pitana, Gde I, dan Gayatri, Putu. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Qomariyah, Erni. 2023. *Collaborative Governance*. Malang: Selaras Media Kreasindo Sedarmayanti,
- Silalahi,U.2009. *Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Sinar Baru Algensindo
- Soekanto Soerjono, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Gravindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryani, Imas, 2016, *Pentahelix model to increase tourist visit To Bandung and its surrounding area through Huan Resource Development*, Jurnal Academic of Strategic Management Volume 15
- Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Thoha, M.1983. *Aspek-Aspek Pokok*

- Ilmu Administrasi: Suatu Bunga Rampai Bacaan*. Balai Aksara.
- Vani, Vio, Resa. 2020. *Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru*. PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA Volume 8
- Yoeti, O. A. 2008 *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Web site:

<http://Puromangkunegaran.com>
(diakses: tanggal 24 Juni 2024 jam 19.30)

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 – 2027
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah tahun 2016 – 2026
- Rangkuti, Freddy, 2019, Analisis SWOT : Teknik membedah Kasus Bisnis (cara perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Cetakan

keduapuluh Lima. Jakarta:
PT Gramedia Pustaka
Umum.

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 10 tahun 2009 tentang
Kepariwisataaan Undang-undang
Republik Indonesia nomor 6 tahun
2014 tentang Desa Undang-undang
Republik Indonesia nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang nomor 59 tahun 2024
tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2025 - 2045